

PRINSIP-PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM DAN PENGARUH TERHADAP PENETAPAN STANDAR AKUNTANSI

Koenta Adji Koerniawan

Abstrak: Ekonomi islam merupakan suatu hal yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bisnis. Tidak ada keraguan sebagai mayoritas pemeluk Islam untuk melaksanakan konsep-konsep yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam pandangan Islam, hukum berasal dari Tuhan (*Allah*) dan manusia hanya bisa mendaftar dan memperluasnya untuk situasi yang berbeda. Di barat, hukum dilewatkan untuk mengakomodasi situasi yang ada sementara, dalam pandangan Islam, situasi yang ada harus berubah menjadi sesuai dengan Hukum Ilahi. Singkatnya, tanpa aplikasi pengaturan Islami'ah Syariat Islam Standar Akuntansi tidak mungkin. Elemen yang harus dipertimbangkan mencakup: elemen-elemen ekonomi Islam yang paling penting yang adalah keadilan sosial melalui penerapan larangan riba, zakat, dan etika Islam. Faktor-faktor lain seperti dan Internasional elemen Lingkungan yang mempengaruhi masyarakat Muslim dan adopsi dari unsur-unsur yang mungkin didasarkan pada ijtihad melalui penerapan "Waktu" dan "Tempat".

Kata kunci: Ekonomi, Islam, Standar Akuntansi Keuangan

PENDAHULUAN

Perhatian tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi dalam literatur akuntansi, secara umum, standar akuntansi memulai diskusi dari kebutuhan pengguna atau tujuan laporan keuangan meskipun asumsi setiap komunitas ekonomi telah melalui pertimbangan yang ketat untuk mencirikan model *financial statement* dalam berbagai dimensi akuntansi.

Budaya, sosial, ekonomi, dan faktor-faktor politik memiliki efek yang cukup besar pada jenis laporan keuangan yang akan disediakan. Namun, faktor-faktor ini tidak sama di semua negara dan masing-masing negara menggunakan sistem akuntansi, yang cocok dengan spesifikasi mereka sendiri.

Di negara-negara barat berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi penting sebagian besar pengguna laporan keuangan adalah para investor dan para kreditur. Dengan demikian, kelompok lain seperti, social, otoritas pemerintah, dan public berada di langkah kedua.

Konsep teoritis akuntansi di Amerika dan Inggris, berasal dari aksioma yang mewakili sifat dari entitas akuntansi yang beroperasi di perekonomian bebas yang ditandai dengan kepemilikan pribadi atas properti. Sedangkan di belakang

mereka ada tersembunyi prinsip-prinsip dasar ekonomi yang belum ditulis dalam literatur akuntansi karena mereka dianggap sebagai aksioma.

Konsep "Prinsip Dasar ekonomi" dalam penetapan standar akuntansi telah diabaikan oleh kebanyakan ahli, meskipun potensinya untuk memberikan apresiasi yang lebih sistematis dari proses pengaturan standar.

Pemikiran para ahli ekonomi sejak abad kedelapan belas seperti Smith, Ricardo, Marsekal, dan Mill mulai menulis tentang makna kekayaan, akumulasi modal dan pentingnya kegiatan ekonomi. Ekonomi menjadi secara bertahap, baik dalam disiplin ilmu maupun dalam aktifitas kegiatan menjadi berbeda di banyak daerah, dan juga menjadi terpisah dari etika.

Ekonomi klasik, yang muncul pada abad kedelapan belas dan dibawa ke dunia baru oleh kaum Puritan adalah terkait dengan aspek tertentu dari etika Protestan yang menekankan kebajikan kerja keras dan mengumpulkan kekayaan berbeda dengan etika Katolik. Namun, akar agama ekonomi kapitalis menjadi lebih berkurang cahayanya, sebagai akibat dari ekseseks dari jenis ekonomi hanya didasarkan pada pentingnya insentif untuk mengumpulkan kekayaan, reaksi terhadap kapitalisme dengan sosialisme yang dianut oleh Marx dan sosialis lainnya. Nasr (1993, 205).

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Sebelum menjelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, maka prinsip-prinsip dasar dari ekonomi liberalisme dalam pandangan Islam akan dinyatakan, karena berguna untuk perbandingan. Kemudian beberapa fitur penting dari prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dan efeknya pada pengaturan standar akuntansi akan dipertimbangkan.

Menurut Holton (1992, 54-69) prinsip-prinsip dasar ekonomi liberalisme, merupakan campuran dari ide-ide yang berasal dan diadopsi dari berbagai sumber. Termasuk ekonom abad 18, Adam Smith, sekolah neo-klasik ekonomi dan yang lebih baru pasca-perang ekonom seperti yang dimotori oleh Milton Friedman. Prinsip-prinsip dasar dari tradisi ekonomi liberalis ini adalah sebagai berikut:

- a. Swasta Hak Kekayaan
- b. Individu Kedaulatan,
- c. Self-bunga,
- d. Rasionalitas,
- e. Self-Pengaturan Pasar.

Ekonomi sebagai bagian dari aktivitas manusia, berkaitan dengan produksi barang, mengumpulkan kekayaan, tenaga kerja, akumulasi perdagangan dan pertukaran objek material, dll, telah penting dalam setiap peradaban.

Pandangan Islam, seperti dalam peradaban tradisional lainnya, ekonomi tidak pernah dianggap sebagai suatu disiplin yang terpisah atau domain yang berbeda dari aktivitas manusia. Akibatnya, tidak ada kata ekonomi dalam bahasa Arab klasik. Dalam masa berikutnya, *Iqtisad* (ekonomi) menjadi terjemahan baru dalam istilah modern "ekonomi" dalam bahasa Arab dan memiliki arti yang sangat berbeda dalam bahasa Arab klasik. Dimana itu berarti 'menjaga emas', seperti yang tercantum dalam buku yang terkenal *Ihya Ulum-id-Din*, Gazzali. (1971,265).

Menurut Sadr (1994,51-55), ekonomi Islam terdiri dari tiga komponen dasar, sesuai dengan konten yang teoretis yang dibedakan dari teori ekonomi lain, yaitu:

- a. Prinsip kepemilikan multi-faceted;
- b. Prinsip kebebasan ekonomi dalam batas yang ditetapkan;
- c. Prinsip keadilan sosial.

Prinsip kepemilikan multi-faceted

Islam berbeda pada dasarnya dari kapitalisme dan sosialisme dalam sifat prinsip pengakuan kepemilikan. Masyarakat kapitalis percaya unsur kepemilikan dalam bentuk individu swasta, yaitu kepemilikan pribadi. Hal ini memungkinkan kepemilikan swasta individu dari berbagai jenis kekayaan di negara ini sesuai dengan kegiatan dan keadaan. Islam hanya mengakui kepemilikan publik bila diminta oleh kebutuhan sosial dan perlunya nasionalisasi untuk menjaga utilitas.

Sosialisme masyarakat benar-benar bertentangan dengan itu. Jadi kepemilikan umum adalah prinsip umum, yang diterapkan untuk setiap jenis kekayaan. Namun, sifat dasar kedua masyarakat ini tidak berlaku untuk masyarakat Islam karena masyarakat Islam tidak setuju dengan kapitalisme di doktrin bahwa kepemilikan pribadi adalah prinsip, atau dengan sosialisme dalam pandangannya bahwa kepemilikan umum adalah sebuah prinsip umum. Melainkan mengakui kepemilikan bentuk yang berbeda pada saat yang sama. Dengan demikian meletakkan prinsip kepemilikan multi-faceted. Itu berarti dari sudut pandang Islam kepemilikan diterima dalam berbagai bentuk-bukan prinsip hanya satu jenis kepemilikan, seperti, kepemilikan pribadi, kepemilikan publik dan kepemilikan negara.

Untuk alasan ini, akan menjadi kesalahan untuk memanggil Islam masyarakat kapitalis, meskipun itu memungkinkan kepemilikan pribadi dari sejumlah jenis properti dan alat-alat produksi, karena kepemilikan pandangan pribadi adalah bukan aturan dasar. Dengan cara yang sama itu akan menjadi kesalahan untuk menggunakan istilah "sosialis" masyarakat untuk masyarakat Islam, meskipun telah mengadopsi kepemilikan publik dan kepemilikan negara untuk beberapa jenis kekayaan dan properti, karena dalam pandangannya bentuk sosialis kepemilikan tidak aturan umum.

Menurut ayat Quaranic, setiap hal di alam semesta ini milik Allah SWT. "Apapun yang di langit dan apa yang ada di bumi milik Allah." [Al-Baqarah, 2:284]. Dia adalah pemilik asli dari segala sesuatu "Dan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu." [Al-Imran, 3:189].

Sadr (1994, 98-114) membuat jelas bahwa kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan publik tiga bentuk paralel dalam hukum Islam. Real kepemilikan adalah milik Allah, manusia memegang properti di kepercayaan yang ia bertanggung jawab kepada-Nya, sesuai dengan aturan yang jelas ditetapkan dalam *syariat Islami'iah* [Islam Pengajaran] digarisbawahi di atas.

Siddiqi (1981, 191-209) Menurut perolehan aktiva serta penggunaan dan pembuangan tunduk pada batas yang ditetapkan dan harus dibimbing oleh norma-norma yang ditetapkan oleh Allah. Absolute kepemilikan manusia adalah konsep asing bagi Islam, karena milik Allah semata. Ada kewajiban yang pasti terhadap orang lain yang hadir pada hak-hak kepemilikan individu. Lingkup masing-masing

dari tiga jenis kepemilikan tidak kaku didefinisikan tetapi dibiarkan ditentukan dalam cahaya prinsip-prinsip tertentu, tergantung pada kebutuhan dan keadaan.

Prinsip kebebasan ekonomi dalam batas yang ditetapkan

Yang kedua komponen ekonomi Islam adalah untuk memungkinkan individu, di tingkat ekonomi, kebebasan yang terbatas, dalam batas-batas spiritual dan nilai-nilai moral di mana Islam percaya. Pelaksanaan prinsip ini dalam Islam dilakukan dengan cara berikut:

1. Hukum agama, dalam sumber-sumber umum, asalkan ketentuan tekstual untuk melarang kelompok kegiatan sosial dan ekonomi, yang menghambat, dalam pandangan Islam, realisasi cita-cita dan dinilai diadopsi oleh Islam, seperti riba, monopoli dan seperti.
2. Hukum agama diletakkan ditaburkan pada prinsipnya pengawasan penguasa atas kegiatan umum dan intervensi negara untuk melindungi dan menjaga kepentingan publik melalui pembatasan kebebasan individu dalam aksi yang mereka lakukan. Mengenai kepentingan pribadi, Islam menekankan bahwa keberhasilan individu dan masyarakat tergantung keseimbangan antara spiritual dan material kebutuhan manusia. Berdasarkan prinsip kepemilikan terbatas yang berasal dari teks Al-Quran yang disebutkan di atas, manusia adalah baik mutlak maupun pemilik total pemilik bumi dan sumber dayanya. Dia tidak memiliki hak untuk memiliki sebanyak yang ia inginkan atau untuk mendapatkan kekayaan materi dengan cara apapun ia dapat memilih. Memang, karena kekhalifahan milik semua orang, setiap individu adalah penjaga kepercayaan publik. Selain itu, kepemilikannya harus dibatasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Maudoodi (1973 : 87-98) Ini harus mempertahankan keseimbangan yang tepat antara kebutuhan tubuh dan jiwa sehingga kepentingan pribadinya serta kesejahteraan masyarakat mungkin dilindungi. Selain itu, ini tidak boleh diabaikan bahwa kemajuan manusia selalu tergantung pada keberhasilan koordinasi dan keharmonisan penting yang ada antara aspek-aspek spiritual dan material kehidupan. Ketika kehidupan rohani terlepas dari perjuangan ekonomi manusia, keseimbangan diperlukan dominan akan marah. Tentu saja, prevalensi seperti keseimbangan yang konstruktif sangat penting bagi pemeliharaan stabilitas dalam struktur ekonomi. Sehubungan dengan Rasionalitas, berbagai pandangan dan pengertian yang berbeda sering ada dalam referensi untuk mendefinisikan arti itu. Menurut Weber (1970, 56) tindakan rasional secara eksplisit didefinisikan sebagai karakteristik pembatasan dalam hal yang mengadopsi cara untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Sebagai soal fakta, nilai atau emosi dalam hal ini tidak dengan sendirinya dianggap rasional. Islam telah jalan berpikir hidup sesuai dengan yang hidup seorang Muslim di dunia ini adalah sebuah fase sementara dalam kehidupan abadi akhirat. "Tapi mencari tempat tinggal di akhirat dalam apa yang Allah telah memberikan Anda dan mengabaikan tidak berbagi dunia Anda." [Qasas 28:77]. Menurut Islahi (1978 : 122-128) kesuksesan di akhirat tergantung pada pemanfaatan sumber daya dunia ini dalam cara terbaik dan kanan.

Tentang masalah-mengatur pasar sendiri, Kamali (1994 : 25-36) telah menyatakan bahwa *Suq* [Pasar] menikmati mempunyai tempat khusus dalam sejarah ekonomi Islam. Pasar diatur oleh mekanisme harga. Fitur penting dari mekanisme harga adalah kemampuan untuk mengatur dan membawa ke keseimbangan permintaan dan pasokan komoditas. Menurut Chapra (1980 : 126) dengan mengacu pada prinsip-prinsip Islam, kekuatan penawaran dan permintaan telah diakui dengan baik di pasar. Orang-orang dibiarkan bebas untuk bertransaksi bertukar barang dan jasa dan negara hanya dapat intervensi jika *dhulm* [pelanggaran] adalah sah dilakukan terhadap salah satu pihak. Menurut Beheshti (, 1992 126) *Shari'ah* panggilan untuk dan bebas perdagangan yang adil, sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip. Selain itu, pengendalian harga hanya sebagai alat vindicating kebebasan ini dan memerangi korupsi cukup divalidasi. Bahkan, meskipun Islam telah mengakui sistem pasar karena kebebasan ini menawarkan kepada individu, hal ini tidak dianggap sakral dan yang tak dapat diubah. Ini adalah tujuan dari masyarakat muslim, yang lebih penting, yaitu *Ihtikar* [penimbunan dan mencari keuntungan] dari kebutuhan penting yang orang untuk komoditas tertentu yang benar-benar dilarang.

Prinsip keadilan sosial

Komponen ketiga dalam ekonomi Islam yang merupakan atribut yang paling penting dalam perekonomian Islam adalah prinsip keadilan sosial. Hal ini diwujudkan dalam Islam oleh unsur-unsur dan jaminan yang, Islam disediakan untuk sistem distribusi kekayaan dalam masyarakat Islam.

Citra Islam keadilan sosial mengandung dua prinsip-prinsip umum masing-masing dari mereka memiliki garis sendiri dan kekhasan. Yang pertama dari mereka adalah prinsip tanggung jawab bersama umum yang lain adalah prinsip keseimbangan sosial.

Islam mengijinkan perbedaan kekayaan dalam batas yang wajar tetapi tidak mentolerir perbedaan ini tumbuh begitu luas bahwa beberapa orang menghabiskan hidup mereka dalam kemewahan dan kenyamanan, sedangkan sebagian besar manusia dibiarkan untuk menjalani hidup kesengsaraan dan kelaparan.

Menurut Tabatabaei (, 1980 94-105) keadilan sosial kunci ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan yang Allah, alam semesta dan umat-Nya, dan sifat dan tujuan yang hidup manusia di bumi mendefinisikan. *Tauhid* [monoteisme] Man-hubungan Tuhan . Jika seorang pria percaya pada Allah dan hari kiamat, dia sadar sepenuhnya tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah dan makhluk-Nya,. Dengan demikian keberhasilan manusia tergantung pada berikut perintah-Nya dan menciptakan keharmonisan antara moralitas dan aspek material dari kehidupan.

Unsur kedua setelah Tauhid untuk pelaksanaan keadilan sosial *Ijtihad* menurut Enayat (, 1991 217) *Ijtihad* berarti penilaian hukum independen, usaha, atau kemampuan untuk menyimpulkan aturan dari sumber. Memang benar bahwa prinsip diberikan oleh Nabi Suci yang diberikan pada usia tertentu, dalam kondisi tertentu, dan diterapkan pada masyarakat tertentu di bawah kondisi yang berbeda sepenuhnya dari hari ini. Hussain (1992, 260) menunjukkan bahwa masyarakat Muslim hari ini menghadapi masalah politik, ekonomi dan sosial banyak yang

dapat diselesaikan hanya melalui Ijtihad, khususnya isu-isu dalam hal mana, tidak ada perintah jelas tersedia dalam Quran atau Sunnah [The Teman-tindakan Nabi atau mengatakan].

Unsur ketiga untuk penegakan keadilan sosial adalah etika. Penting untuk disebutkan di sini bahwa di Barat di antara mereka yang telah berusaha untuk berhubungan ekonomi dengan etika, itu sendiri sebagian besar dianggap dalam humanistik vena murni diciptakan oleh manusia. Sebaliknya, dalam Islam, ekonomi dianggap berkaitan dengan etika dan etika pada gilirannya berhubungan dengan agama. Oleh karena itu, benar-benar *Islami'ah* Syariat di mana apa yang disebut keadilan sosial ekonomi Islam harus berfungsi dan menemukan maknanya. *Zakat*, *Riba* [Larangan Bunga], stabilitas pada nilai Real Uang, dan Tanggung Jawab Negara untuk pendapatan distribusi alat Original untuk melaksanakan keadilan sosial dalam masyarakat.

Zakat

Salah satu unsur yang paling penting untuk membangun keadilan sosial zakat). Menurut Rahman 1986 (, 318-462 zakat bukanlah pajak umum, namun adalah pajak khusus yang dikenakan pada anggota Muslim negara saja dan dibayar oleh mereka sebagai suatu kewajiban agama dan ibadah untuk menyenangkan Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya zakat dapat dinilai dengan fakta bahwa ia telah termasuk di antara rukun Islam, kedua hanya untuk doa-doa. Tugas wajib membayar zakat ditekankan dalam Quran, namun jenis aset yang memiliki zakat tidak ditentukan. Dengan demikian, sifat pada hari-hari awal Islam yang berlaku untuk zakat tidak sama dengan properti hari ini, karena jenis aktiva tersebut berubah selama dua periode. Ada pendapat yang berbeda mengenai properti, yang berlaku untuk zakat antara ahli hukum. Menurut Sadr (, 1994 237) contoh zakat dan Nisb [pembebasan batas] dan jumlah mereka dalam setiap periode ditentukan oleh Ijtihad sehubungan dengan kondisi waktu dan tempat.

Riba

Al-Qur'an menggunakan kata riba untuk bunga. Menurut Maududi (1973, 92) riba yang diperoleh ketika seorang pria meminjamkan uang lain dengan syarat bahwa setelah waktu tertentu ia akan dikenakan jumlah uang yang tetap selain uangnya. Bunga dilarang dalam Islam dan orang tidak diperbolehkan untuk membuat uang dengan modal terkemuka mereka pada bunga. Oleh karena itu mungkin bahwa mereka akan menanamkan modalnya secara produktif, dan dengan demikian meningkatkan keuntungan mereka. Keynes (1936,154) telah mencatat bahwa "bunga tidak ada hubungannya dengan mempengaruhi volume tabungan. Praktis, itu adalah tingkat pengembalian atas investasi yang menentukan tingkat tabungan". Islam melarang bunga tapi mendorong investasi.

Stabilitas pada nilai Real Uang

Menurut Chapra (, 1980 152) kejujuran dan keadilan dalam semua tindakan nilai telah benar-benar ditekankan dalam Quran, misalnya, "Dan memberikan ukuran penuh dan berat dengan keadilan" [An'am 6: 152]. Ayat Quran tidak harus diterapkan hanya bagi individu tetapi juga untuk sosial dan negara dan tidak boleh dibatasi hanya untuk berat konvensional dan ukuran tetapi

juga harus mencakup semua tindakan nilai. Hal ini maka dapat dipertimbangkan wajib bagi negara Islam untuk menggunakan uang yang sehat, kebijakan fiskal dan kontrol yang tepat bila diperlukan, untuk meminimalkan erosi dalam nilai riil uang.

Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab dari sebuah Negara Islam adalah untuk menyediakan lingkungan yang sesuai untuk pelaksanaan aturan Islam di masyarakat. Aturan Islam [Syariat], "jalan luas" dapat digambarkan sebagai keseluruhan perintah Ilahi tentang tindakan manusia, karena Tuhan adalah Legislator Tunggal.

Ada perbedaan pendapat di kalangan sarjana Muslim tentang penggunaan kekuatan dalam mengambil alih surplus orang kaya. Beberapa dari mereka komentar bahwa negara dapat mengambil surplus hanya dengan bujukan atau dengan persetujuan dari orang kaya. Lain seperti Ali Syari'ati (1987, 124-128) berpendapat bahwa Abu Zar, seorang sahabat terkenal Nabi saw, percaya bahwa surplus kekayaan orang kaya harus diambil alih oleh negara dengan atau tanpa persetujuan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan tak berdaya. Menurut Qutb (, 1977 43) negara Islam bertanggung jawab atas penyediaan kebutuhan dasar kepada para anggotanya. Fondasi ekonomi yang benar dan hanya didasarkan pada aturan Islam tanpa mendirikan Negara Islam adalah mustahil.

PEMBAHASAN

Ekonomi Islam Dan Akuntansi Standar-Pengaturan

Model Akuntansi Syariah berdasarkan Ekonomi Makro. Sementara Inggris Amerika, model akuntansi didasarkan pada Ekonomi mikro. Dalam model terakhir, fokusnya adalah pada perusahaan sebagai suatu entitas ekonomi yang mempengaruhi perekonomian melalui operasi di pasar.

Ada banyak negara lain yang ekonomi mereka didasarkan pada makroekonomi. Ekonomi Islam didasarkan pada makroekonomi tidak sama dengan negara lain seperti Eropa Timur atau bahkan seperti Swedia. Di sisi lain pendapat tentang ekonomi Islam bahkan di kalangan cendekiawan Muslim berbeda. Oleh karena itu makroekonomi tidak hanya fitur utama untuk pembentukan model akuntansi Islam. Oleh karena itu sumber utama untuk pengembangan model akuntansi Islam adalah untuk mengambil keuntungan dari Syariat *Islami'iah*, atau hukum Islam. Gerak hukum di mata pelajaran ekonomi Barat dalam kehidupan dunia modern adalah berbeda dari sudut pandang Islam. Dalam hukum barat yang dianggap sebagai kebijaksanaan berdasarkan urgensi sosial saat ini.

Konsep hukum dalam Islam sangat berbeda. Dalam pandangan Islam, hukum berasal dari Tuhan (*Allah*) dan manusia hanya bisa mendaftar dan memperluasnya untuk situasi yang berbeda. Di barat, hukum dilewatkan untuk mengakomodasi situasi yang ada sementara, dalam pandangan Islam, situasi yang ada harus berubah menjadi sesuai dengan Hukum Ilahi. Muthahhari (1993, 206).

Islam, seperti semua agama besar dunia, membutuhkan orang-orang untuk melaksanakan perilaku yang etis dalam menangani mereka satu sama lain dan dengan sumber daya yang tersedia bagi mereka.

Pengguna dan tujuan laporan keuangan

Kepemilikan harta pribadi adalah salah satu prinsip dasar yang paling penting ekonomi liberalisme, yang berpengaruh pada sistem akuntansi. Tema dasar adalah bahwa akuntansi harus berfokus pada entitas dan menyediakan informasi keuangan untuk investor dan kreditor. Sedangkan mengenai dasar Islam kepemilikan publik pokok ekonomi dan kepemilikan negara lebih penting daripada kepemilikan swasta harus Oleh karena itu. Akuntansi fokus pada negara dan memberikan informasi keuangan bagi pemerintah dan masyarakat.

Model akuntansi Islam, pengguna utama laporan keuangan adalah pemerintah. Karena pengumpulan pajak, seperti, zakat dan pajak lainnya negara dan menghabiskan dari mereka berada dalam kewenangan Negara Islam. Laporan akuntansi keuangan harus berguna untuk:

- a. Relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan menilai kemampuan manajemen dan seluruh organisasi-efisiensi tenaga kerja digunakan dari sumber daya perusahaan yang berkaitan dengan norma-norma Islam untuk mencapai perusahaan utama dan tujuan sosial.
- b. Mengevaluasi efisiensi manajemen dalam distribusi pendapatan untuk mencapai keadilan ekonomi.

Laporan keuangan untuk mencapai tujuan yang disebutkan di atas untuk memberikan pengungkapan penuh kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip yang diabadikan dalam syari'at. Dengan kata lain, seluruh kegiatan usaha, yaitu haram (haram), harus diungkapkan.

Keputusan konteks kegunaan dan akuntabilitas yang telah digunakan untuk pengembangan laporan akuntansi keuangan dari pandangan Islam dimaksudkan untuk memberikan informasi untuk pelarangan bunga dalam perusahaan.

Menurut Baydoun dan Willett, (1997, 12-19) akuntansi implikasi dari syari'at mencakup empat judul. Kebutuhan untuk menghitung dengan benar zakat, pelarangan bunga, konsep akuntabilitas sosial dan konsep pengungkapan penuh.

Konsep teoretis Akuntansi dan Pengaruhnya mereka pada Laporan Keuangan

Model Inggris-Amerika didasarkan pada Teori Badan. Dalam teori entitas, laba bersih bukan milik para pemilik atau pemilik, tapi untuk entitas, yang dianggap sebagai yang terpisah dan berbeda dari penyedia modal. Dalam pandangan Islam, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Semua individu tetapi tidak entitas secara pribadi bertanggung jawab atas komisi atau kelalaian dalam serta ekonomis urusan agama dan ibadah keuangan. Model akuntansi Islam didasarkan pada Teori Proprietary. Menurut Belkaoui (, 1993 233) dalam teori kepemilikan, pemilik adalah pusat kepentingan;. Di bawah kepemilikan teori, aktiva diasumsikan dimiliki oleh pemilik dan kewajiban dan utang berutang beban menurun pada kepemilikan dan pendapatan yang meningkat. Teori ini berorientasi neraca.

Model Inggris - Amerika, fokus utama adalah pada laporan laba rugi dan neraca dianggap. Laporan laba rugi berdasarkan asumsi ekonomi mikro terbatas pada pertukaran transaksi antara entitas ekonomi. Dalam model ini sampai saat ini, dampak sosial telah diabaikan. Selain itu, laporan laba rugi didasarkan pada

pendapatan - pendekatan beban. Dalam model Akuntansi Syariah, fokus utama adalah pada neraca. Pengaruh selisih antara perusahaan dan lingkungan sosialnya dianggap dan distribusi pendapatan di perusahaan dan masyarakat yang melihat. Dalam model pendapatan didasarkan pada aktiva - pendekatan kewajiban. Pendapatan, yang dalam bentuk pendapatan komprehensif, dapat digunakan oleh kombinasi akuntansi sosial ekonomi dan pernyataan nilai tambah untuk presentasi. Model Inggris - Amerika, klasifikasi aset dan kewajiban berdasarkan going - asumsi perhatian. Sementara, Perjudian dan karim (, 1991 84) berpendapat bahwa: dari perspektif Islam, tidak ada alasan yang relevan, mereka menyarankan klasifikasi harus didasarkan pada orientasi zakat.

Model Inggris - Amerika, penilaian aset pada dasarnya dibenarkan oleh konsep konservatisme. Sementara, Perjudian dan Karim (1991, 88-99) berpendapat bahwa konsep konservatisme tidak berhubungan dengan ajaran Islam. Valuasi dasar kekayaan, yang bertanggung jawab untuk pajak agama, harus didasarkan pada harga keluar saat ini.

KESIMPULAN

Pembahasan prinsip-prinsip dasar dan fitur menonjol lain ekonomi Islam, dan kemudian pengaruhnya terhadap pengguna laporan keuangan dan tujuan laporan keuangan telah dipertimbangkan. Beberapa aspek akuntansi seperti penilaian aset, konsep teori telah melihat. Persamaan dan perbedaan akuntansi elemen dalam penetapan standar untuk model akuntansi Islam versus-model Inggris - Amerika diringkas dalam tabel 1.

Tabel 1
Persamaan dan perbedaan Model Akuntansi Islam dan Model Inggris – Amerika

Elemen	Inggris-Amerika Model	Model Islam
Pendekatan Ekonomi	Mikro	Makro
Primer Pengguna	Investor dan Kreditor	Negara, Manajemen, Orang
Kebijakan Akuntansi	Berorientasi tujuan	Berorientasi Nilai
Penilaian Aset	Sejarah Biaya Harga	Keluar Lancar Harga
Penentuan Pendapatan	Pendapatan-Biaya Pendekatan	Pendekatan Aset-Kewajiban
Waktu Nilai Uang	Ya	Tidak ada
Jangka Waktu	Ya	Ya
Fokus Utama	Laporan Laba Rugi	Neraca
Konsep Teoritis	Entitas Teori	Teori Proprietary
Kelangsungan Postulat	Berdasarkan Penghasilan	Berdasarkan Hukum Islam

Bunga Tetap	Ya	Tidak ada
Legalistik Orientasi	Hukum umum	Hukum agama
Aturan Akuntansi	Teknis	Etis
Etika Akuntansi	Etika Profesional	Agama Etika
Pasar Bursa Efek	Ya	Ya
Obligasi	Ya	Ya dengan kondisi permintaan
Pendekatan Akuntansi	Pendekatan Nilai	Event Pendekatan
Dikotomi Moralitas Bisnis dan Swasta	Ya	Tidak ada

Tidak ada keraguan bahwa penggunaan model Inggris-Amerika di negara-negara Islam, menurut Choi dan Muller (1992, 57) bukan untuk keunggulannya, tetapi untuk politik dan ekonomi alasannya. Hari ini di Barat, serta di dunia Islam itu sendiri, ada kebutuhan untuk mempelajari kedua nilai dan norma Islam dari sudut pandang sendiri dan pengaruhnya terhadap praktek akuntansi. Mueller, Gernon dan Meek Dalam edisi ketiga buku mereka (1994, 12) telah menyatakan bahwa model akuntansi Islam muncul model, dan menulis satu paragraf tentang hal ini). Namun dalam keempat edisi mereka buku (1997, mereka bahkan menghilangkan ayat .

Singkatnya, tanpa aplikasi pengaturan Islami'ah Syariat Islam Standar Akuntansi tidak mungkin. Elemen yang harus dipertimbangkan mencakup: elemen-elemen ekonomi Islam yang paling penting yang adalah keadilan sosial melalui penerapan larangan riba, zakat, dan etika Islam. Faktor-faktor lain seperti dan Internasional elemen Lingkungan yang mempengaruhi masyarakat Muslim dan adopsi dari unsur-unsur yang mungkin didasarkan pada ijtihad melalui penerapan "Waktu" dan "Tempat".

Akuntansi Keuangan Organisasi Bank Islam dan Lembaga Keuangan (FAOIBFI) didirikan di 1991 and namanya diubah menjadi Akuntansi dan Audit Organisasi Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) untuk mengatur standar akuntansi berdasarkan syari'at Islam. Saat ini, AAOFI tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan standar-standar tersebut. Cara terbaik untuk menerapkan standar AAOIFI di negara-negara Muslim berbagai tergantung pada kerjasama akuntan sarjana Muslim. Serikat Organisasi Konferensi Islam (IOC) harus mendukung sumber keuangan untuk pengembangan penelitian untuk standar akuntansi Islam dan resmi mereka untuk penegakan hukum di negara-negara Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Baydoun N dan R Willett, (1997):. *Islam dan Akuntansi Etika: Masalah Penyajian Informasi Keuangan, Akuntansi, Perdagangan & Keuangan Perspektif Islam*; Vol. 1, No 1, Juni, hal 15-19.

- Behesh'ti, SM (1992). *Ekonomi Islam*, Teheran Tekan Fajar.
- Belkaoui, A. (1993). *Teori Akuntansi*. Dryden Press, NY.
- Chapra, Umar (1980),. *The Islamic Kesejahteraan Negara dan Peran Ekonomi Studi di Ekonomi Islam*, Inggris Redwood Burn limited.UK.
- Choi, FDS dan Mueller GG, (1992),. *International Akuntansi* 2nd Edition, Prentice Hall internasional.
- Enayat H. (1991), *Politik Islam Modern. Pemikiran* Macmillan Pub. London. 1991.
- TE Gambling dan RAA Karim, (1991). *Bisnis dan Etika dalam Akuntansi Islam*, Mansell, London.UK.
- Gazzali, I. M.. (1971) *Ihya Ulum-id-Din*, terjemahan bahasa Inggris oleh-Haj maulaana Fazlur Al Karim, Sind Sagar Academy, Lahore, Pakistan.
- Holton, R. (1992),. *Ekonomi dan Masyarakat* Routledge, Inggris.
- Suci Quran*, teks, terjemahan dan komentar oleh A. Yusuf Ali, (1983). Amana Corp,
- Hussain. Z. (1992),. *Rekonstruksi Masyarakat Islam* Ferozsos Ltd Lahore.
- Islahi. SD (1987),. *Islam di Sekilas Panggil ke Islam dan Bagaimana nabi diberitakan*, Lahore, Pakistan.
- Kamali. MH (1994). Tas'ir (Harga Control) di Hukum *Islam*, *The American Journal Ilmu Islam*. Vol.11 No.1. Spring, hal 25-36.
- Karim. RAA, (1996). Konsekuensi Ekonomi Standar Akuntansi dan Bank Islam, *dalam Peraturan Riset Akuntansi*, Vol. 10, hal 111-138.
- Keynes, JM (1936):. *Umum Teori Ketenagakerjaan, bunga dan Uang* New york Harcourt, Brace dan perusahaan.
- Maududi, Abul Ala, (1973). *Masalah Ekonomi Manusia*. Lahore, Pakistan.
- Mueller, G. Gernon, H. dan GK Meek, (1994). *Akuntansi Sebuah Richard Internasional, Perspektif* D. Irwine Inc USA.
- Muthahhari. M. (1993). *Ekonomi Islam*, Pub Sadra. Teheran, Iran.
- Nasr. SH (1993). *Muda Muslim Panduan Untuk Dunia Modern*, Cambridge. Inggris.
- Qutb. M. (1973). *Islam Agama disalahpahami*, Beassat. pub,. Teheran Iran.

- Rahman, Afzalur. (1986) *Encyclopedia. Muhammad Seerah*, yayasan seerah. London, Inggris.
- Sadr, Muhammad. B. (1994). *Iqtisaduna (ekonomi kita)*. 2nd Edition, Teheran, Iran.
- Syari'ati A. (1987), *Abu. Zar (Companion Nabi)* Pub Irsyad. Teheran, Iran.
- MN Siddiqi (1981):. *Muslim Ekonomi Berpikir Sebuah survei Kontemporer Sastra*, Yayasan Islam, Inggris.
- Tabatebaei. MH (1980),. *Sosial Ekonomi Islam Memahami* pub Anteshar. Teheran, Iran.
- Weber. M. (1970):. *'Nabi' dalam kepribadian dan Agama Peran agama dalam pengembangan kepribadian*, Sadler W (ed), SCM Press Ltd, London.